



## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2016, maka memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Utara dan daya beli pengguna jasa, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penyeberangan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7379/AP.204/DRJD/2015 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku mulai tanggal 1 April 2016;
  2. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor SE.15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Ekonomi Kelas Umum;
  3. Hasil pertemuan dengan pihak Operator Kapal terkait pada tanggal 5 April 2016 untuk membahas Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu :

Golongan I : Sepeda;

Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya.

- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (Truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

### Pasal 3

Tarif Angkutan Penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

### Pasal 4

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan Kelas Non Ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

#### Pasal 5

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan/atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan diluar yang diatur dalam peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Gubernur Sulawesi Utara.

#### Pasal 6

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar (Golongan VII, VIII dan IX), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

#### Pasal 7

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan dimaksud Pasal 2 ayat (2) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, namun membayar Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) serta sepeda dikenakan tarif penumpang.

#### Pasal 8

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Premi Asuransi Tanggungan Jawab Pengangkut (TJP) dari PT. Jasa Raharja Putera.

#### Pasal 9

Kepada pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara.

#### Pasal 10

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

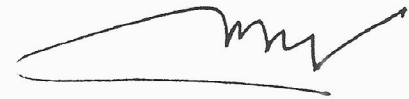
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Mei 2016

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Utara;
10. Dirut PT. Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
11. Dirut PT. (Persero) AK Jasa Rahardja;
12. Dirut PD. Pelayaran Sitaro di Ondong;
13. Direktur PD. Angkutan Penyeberangan  
Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
14. Ketua DPP GAPASDAF di Jakarta.

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Mei 2016

 **SEKRETARIS DAERAH**

**S. R. MOKODONGAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 22 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 20 Mei 2016  
 TENTANG : PERATURAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

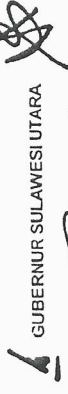
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

LINTASAN	BIAYA (Rp.)	PENUMPANG		KENDARAAN			GOLONGAN V			GOLONGAN VI			GOLONGAN VII			GOLONGAN VIII			GOLONGAN IX			
		DEWASA	ANAK	GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV PENUMPAANG	GOLONGAN IV BARANG	GOLONGAN V PENUMPAANG	GOLONGAN V BARANG	GOLONGAN VI PENUMPAANG	GOLONGAN VI BARANG	GOLONGAN VII PENUMPAANG	GOLONGAN VII BARANG	GOLONGAN VIII PENUMPAANG	GOLONGAN VIII BARANG	GOLONGAN IX PENUMPAANG	GOLONGAN IX BARANG				
AMURANG-MELONGUANE (264 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	116,000 5,000	77,100 5,000	170,400 3,090	296,500 3,700	593,000 7,410	1,853,200 23,190	1,624,100 13,710	2,566,900 57,135	2,430,400 25,215	4,492,800 100,710	4,324,400 36,870	5,167,300 43,170	8,002,200 54,510	4,287,589 43,170	4,324,400 36,870	5,167,300 43,170	8,002,200 54,510	4,492,800 100,710	4,324,400 36,870	5,167,300 43,170	8,002,200 54,510
AMURANG-BOROKO (76 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	60,300 5,000	41,200 5,000	101,100 3,090	175,200 3,700	350,400 7,410	1,095,000 22,875	958,800 13,395	1,527,100 56,820	1,433,900 24,900	2,673,500 100,395	2,548,400 36,555	3,044,800 42,855	4,710,300 54,195	2,511,848 42,855	2,548,400 36,555	3,044,800 42,855	4,710,300 54,195	2,673,500 100,395	2,548,400 36,555	3,044,800 42,855	4,710,300 54,195
BITUNG-PETA (163 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	81,900 5,000	54,900 5,000	118,500 3,090	205,800 3,700	245,700 7,410	1,286,300 23,190	1,125,300 13,710	1,789,500 57,135	1,685,400 25,215	3,132,300 100,710	2,996,300 36,870	3,580,000 43,170	5,540,300 54,510	2,511,848 42,855	2,996,300 36,870	3,580,000 43,170	5,540,300 54,510	3,132,300 100,710	2,996,300 36,870	3,580,000 43,170	5,540,300 54,510
BITUNG-TAGULANDANG (60 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	47,700 5,000	35,800 5,000	76,500 3,090	132,200 3,700	264,500 7,410	826,300 22,875	715,600 13,395	1,131,600 56,820	1,080,900 24,900	2,028,700 100,395	1,918,900 36,555	2,315,500 42,855	3,543,500 54,195	1,882,396 42,855	1,918,900 36,555	2,315,500 42,855	3,543,500 54,195	2,028,700 100,395	1,918,900 36,555	2,315,500 42,855	3,543,500 54,195
LIRUNG-BITUNG (205 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	89,500 5,000	61,700 5,000	134,900 3,090	232,200 3,700	499,500 7,410	1,341,500 23,190	1,288,100 13,710	2,078,600 57,135	1,958,700 25,215	3,616,300 100,710	3,552,400 36,870	4,174,000 43,170	6,628,600 54,510	1,928,308 42,855	3,552,400 36,870	4,174,000 43,170	6,628,600 54,510	3,616,300 100,710	3,552,400 36,870	4,174,000 43,170	6,628,600 54,510
LIKUPANG - MANADO (59 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	38,200 5,000	26,600 5,000	53,218 3,090	93,132 3,700	186,264 7,410	582,074 22,560	548,813 12,774	798,273 56,190	765,012 23,046	1,396,979 100,080	1,363,718 39,327	1,646,439 49,290	2,527,866 60,360	1,363,718 39,327	1,396,979 100,080	1,646,439 49,290	2,527,866 60,360	1,396,979 100,080	1,363,718 39,327	1,646,439 49,290	2,527,866 60,360
AMURANG-PANANARU (157 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	74,100 5,000	49,900 5,000	124,100 3,090	215,500 3,700	431,200 7,410	1,158,300 23,190	1,073,100 13,710	1,949,000 57,135	1,841,400 25,215	3,430,500 100,710	3,328,800 36,870	3,827,000 43,170	6,325,100 54,510	1,949,000 42,855	3,328,800 36,870	3,827,000 43,170	6,325,100 54,510	3,430,500 100,710	3,328,800 36,870	3,827,000 43,170	6,325,100 54,510
BITUNG-MELONGUANE (212 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	69,168 5,000	44,984 5,000	121,084 3,090	211,897 3,700	423,795 7,410	1,135,165 23,190	1,059,488 13,710	1,891,942 57,135	1,816,265 25,215	3,329,819 100,710	3,291,980 36,870	3,783,884 43,170	7,000,450 54,510	1,891,942 42,855	3,291,980 36,870	3,783,884 43,170	7,000,450 54,510	3,329,819 100,710	3,291,980 36,870	3,783,884 43,170	7,000,450 54,510
LIKUPANG-PANANARU (133 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	69,200 5,000	46,700 5,000	115,900 3,090	201,200 3,700	402,400 7,410	1,081,400 23,190	980,200 13,710	1,820,800 57,135	1,732,500 25,215	3,169,600 100,710	2,999,900 36,870	3,570,600 43,170	5,881,200 54,510	1,820,800 42,855	2,999,900 36,870	3,570,600 43,170	5,881,200 54,510	3,169,600 100,710	2,999,900 36,870	3,570,600 43,170	5,881,200 54,510
MELONGUANE-LIKUPANG (209 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	84,600 5,000	56,700 5,000	142,300 3,090	247,300 3,700	494,700 7,410	1,415,400 23,190	1,345,000 13,710	2,145,500 57,135	2,026,600 25,215	3,755,400 100,710	3,604,500 36,870	4,350,500 43,170	6,667,800 54,510	2,145,500 42,855	3,604,500 36,870	4,350,500 43,170	6,667,800 54,510	3,755,400 100,710	3,604,500 36,870	4,350,500 43,170	6,667,800 54,510
MELONGUANE-PANANARU (114 MIL)	TARIF BIAYA POKOK ASURANSI	65,300 5,000	44,200 5,000	95,900 3,090	166,200 3,700	332,500 7,410	1,039,100 23,190	907,700 13,710	1,450,400 57,135	1,335,291 25,215	2,538,900 100,710	2,417,000 36,870	2,887,800 43,170	4,466,500 54,510	1,450,400 42,855	2,417,000 36,870	2,887,800 43,170	4,466,500 54,510	2,538,900 100,710	2,417,000 36,870	2,887,800 43,170	4,466,500 54,510

*Handwritten signature*

SIAU-TAHUNA (63 MIL)	TARIF	48,600	33,300	79,400	137,300	274,700	858,300	801,100	1,202,500	1,122,900	2,105,400	1,993,800	2,405,900	3,682,400	7,416,800
	BIAYA	43,690	28,364	76,384	133,672	267,344	835,451	787,711	1,145,761	1,098,021	2,005,082	1,957,342	2,363,132	3,628,244	7,350,036
	POKOK ASURANSI	5,000	5,000	3,090	3,700	7,410	22,875	13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795
BITUNG-SIAU (90 MIL)	TARIF	57,200	38,900	94,600	163,900	327,800	1,024,200	888,800	1,386,300	1,340,900	2,503,600	2,382,500	2,875,200	4,402,800	8,215,000
	BIAYA	52,249	33,937	91,551	160,215	320,429	1,001,342	875,459	1,339,511	1,316,051	2,403,222	2,346,003	2,832,370	4,348,688	8,148,285
	POKOK ASURANSI	5,000	5,000	3,090	3,700	7,410	22,875	13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795
LIKUPANG-BIARO (43 MIL)	TARIF	42,200	29,100	68,300	117,900	235,900	737,000	686,700	1,036,200	963,500	1,814,400	1,709,700	2,062,900	3,155,700	5,096,400
	BIAYA	37,221	24,184	65,296	114,270	228,538	714,183	673,372	979,451	938,640	1,714,039	1,673,229	2,020,117	3,101,595	5,029,690
	POKOK ASURANSI	5,000	5,000	3,090	3,700	7,410	22,875	13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795
MANGARAN-BITUNG (188 MIL)	TARIF	88,800	59,400	132,000	229,400	458,800	1,345,800	1,239,700	1,992,000	1,879,500	3,486,800	3,342,300	3,993,600	6,181,700	11,877,800
	BIAYA	83,870	54,478	128,985	225,740	451,479	1,322,693	1,226,048	1,934,911	1,854,289	3,386,095	3,305,472	3,950,443	6,127,218	11,810,758
	POKOK ASURANSI	5,000	5,000	3,090	3,700	7,410	23,190	13,710	57,135	25,215	100,710	36,870	43,170	54,510	67,110

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19